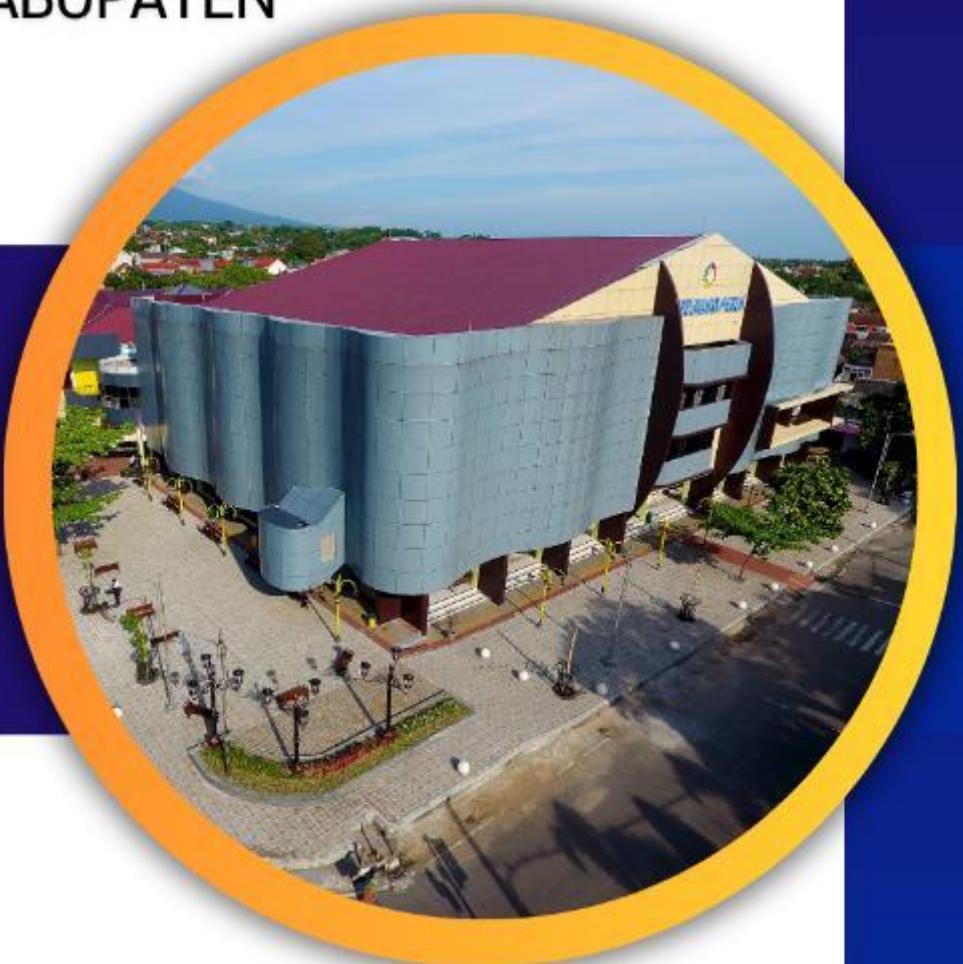




# RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN  
MAGETAN

TAHUN  
2024



Our Website  
[www.dpmptsp.magetan.go.id](http://www.dpmptsp.magetan.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah AWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Ditetapkan di : Magetan  
Tanggal : - - - 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN

  
**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198809 2 001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Hubungan antar dokumen .....	3
1.4. Maksud dan Tujuan .....	5
1.5. Sistimatika Perubahan Renja SKPD .....	6
BAB II     EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	
2.1. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II ....	8
2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan renja tahun berjalan .....	15
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran .....	21
3.2. Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD .....	21
3.3. Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah .....	32
BAB IV. PENUTUP .....	37

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional, provinsi dan Kabupaten Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 356 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan didasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun berjalan, dimana menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Renja Perubahan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan kondisi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan tribulan II, dimana dalam pelaksanaannya menunjukan adanya beberapa kebutuhan yang diperlukan sehingga diperlukan usulan perubahan anggaran baik penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan, penyesuaian target sasaran atau target kinerja. Selain itu terdapat perubahan asumsi ekonomi daerah (kerangka pendanaan daerah), adanya perubahan RKPD, Penyesuaian belanja wajib mengikat dan penyesuaian dan pergeseran pagu anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor );

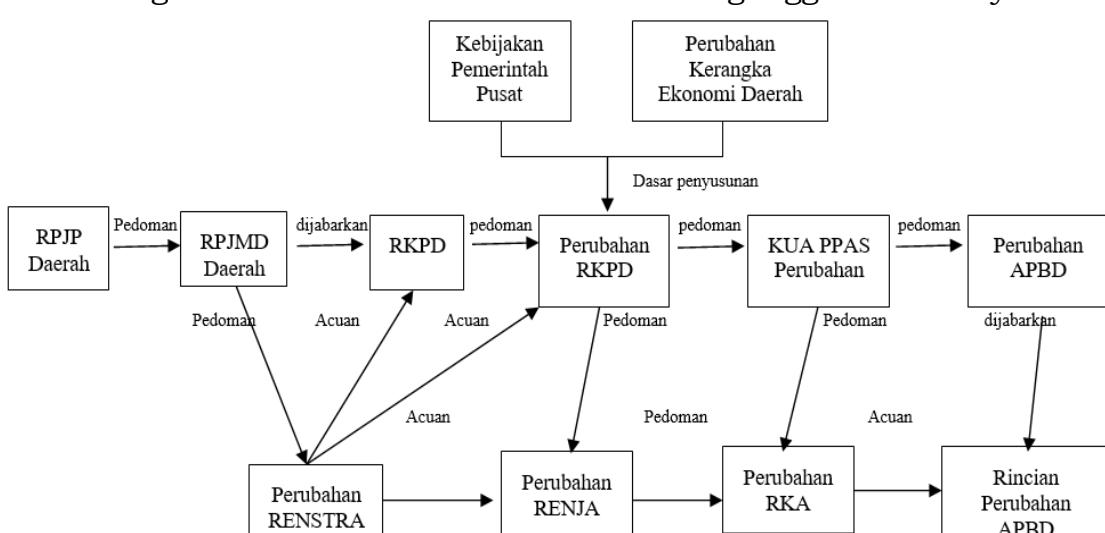
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1 :**

Keterkaitan Antara Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Perubahan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RKPD Perubahan dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;
- c. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan memperhatikan dan mengacu perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
- d. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran;
- e. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1.Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuensi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

##### **1.4.2.Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 yaitu :

1. Menyediakan acuan dan panduan dalam menentukan prioritas, program dan kegiatan Tahun 2024;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2024;
3. Memberikan gambaran kondisi umum Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;
4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2024.

### **1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang         | : Dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang Perubahan kerangka pendanaan Perangkat Daerah.                    |
| 1.2 Landasan Hukum         | : Uraian ringkas dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan perubahan Renja PD ,baik yang bersekala nasional maupun lokal         |
| 1.3 Hubungan antar dokumen | : Hubungan Perubahan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya) |
| 1.4 Maksud dan Tujuan      | : Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja PD  |
| 1.5 Sistimatika Penulisan  | : Berisi tentang sistimatika penyajian/ penyusunan perubahan renja PD   |

## **BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II : Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan tribulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan terget Renstra PD)
- 2.2 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan : Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (progres permasalahan dan solusi yang diambil)

## **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran : Memuat tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RenstraPerangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga memuat target capain IKU dan IKD sesuai tusi kewenangan PD setara dengan target d RPJMD dan P-RKPD
- 3.2 Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD : Membedikan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P Renja PD terkait target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing masing program kegiatan/ sub kegiatan
- 3.3 Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah : Memuat Pergeseran / perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tribulan II**

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024. berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode tertentu.

Pada tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan 6 (enam) Program dengan 12 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub Kegiatan. Berikut adalah capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				4	5	6	K		K	K		
1	2	3	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	7	8	K	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
2.18.02.2.01	Penetapan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	61	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	1,64
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0,00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   Dokumen	60	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	1,67
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0,00
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi   Daerah	1	Daerah	1	Daerah	0	Daerah	0,00	0	Daerah	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	25	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	50,00	4	Dokumen	16,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				4	5	6	K	K	K		Volume	Satuan	
1	2	3	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	7	Volume	Satuan	9
	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>												
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   Dokumen	24	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	50,00	4	Dokumen	16,67	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota   Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0,00	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pengendalian Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1200	Pelaku Usaha	218	Pelaku Usaha	81	Pelaku Usaha	37,16	81	Pelaku Usaha	6,75	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   Kegiatan Usaha	150	Kegiatan Usaha	6	Kegiatan Usaha	2	Kegiatan Usaha	33,33	2	Kegiatan Usaha	1,33	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   Pelaku Usaha	900	Pelaku Usaha	200	Pelaku Usaha	75	Pelaku Usaha	37,50	75	Pelaku Usaha	8,33	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha   Kegiatan Usaha	150	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	4	Kegiatan Usaha	33,33	4	Kegiatan Usaha	2,67	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				4	5	6	K	K		Volume	Satuan	
1	2	3	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	7	Volume	Satuan	9
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	6	Bulan	50,00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota   Dokumen	150	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	0,67
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   Pelaku Usaha	12750	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	3103	Pelaku Usaha	155,15	3103	Pelaku Usaha	24,34
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  Pelaku Usaha	72	Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0,00	0	Pelaku Usaha	0,00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha   Kegiatan Usaha	180	Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	8	Kegiatan Usaha	66,67	8	Kegiatan Usaha	4,44
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan	5	Aplikasi	1	Aplikasi	0	Aplikasi	0,00	0	Aplikasi	0,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	5	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)						Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
				4	5	6	K		Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	2	3	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	7	Volume	Satuan	8	9
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik yang Dilolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   Dokumen											
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kepuasan ASN DPMPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSP    Indeks	90	Indeks	90	Indeks	0	Indeks	0,00	0	Indeks	0,00	
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu    Dokumen	54	Dokumen	18	Dokumen	10	Dokumen	55,56	10	Dokumen	18,52	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	21	Dokumen	7	Dokumen	4	Dokumen	57,14	4	Dokumen	19,05	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	33	Laporan	11	Laporan	6	Laporan	54,55	6	Laporan	18,18	
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %</b>	100	%	100	%	50	%	50,00	50	%	50,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	933	Orang/ Bulan	311	Orang/ Bulan	130	Orang/ Bulan	42,00	130	Orang/ Bulan	42,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	6	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0,00	
2.18.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	-	0	Laporan	0,00	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	-	0	Laporan	0,00	
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur    Orang</b>	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00	50	Orang	100,00	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50	Stell	0	Stell	0	Stell	-	0	Stell	0,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00	50	Orang	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				4 K	5 K	6 K	K		Volume	Satuan		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Paket	252	Paket	252	Paket	42	Paket	16,67	42	Paket	16,67
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	50,00	6	Paket	50,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	50,00	6	Paket	50,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	50,00	6	Paket	50,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	50,00	6	Paket	50,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	50,00	6	Paket	50,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan    Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50,00	6	Dokumen	50,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00	6	Laporan	50,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan	132	Laporan	36	Laporan	18	Laporan	50,00	18	Laporan	13,64
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00	6	Laporan	50,00
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00	6	Laporan	50,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	20	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00	6	Laporan	30,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara    Unit	20	Unit	18	Unit	10	Unit	55,56	10	Unit	50,00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	18	Unit	16	Unit	8	Unit	50,00	8	Unit	44,44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (TW II)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan /Tahun 2024 (s.d TW II)
				4	5	6	K		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit							
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	2	Gedung	2	Gedung	1	Gedung	50,00
								41,67	
									41,67

## **2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun Berjalan**

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran menunjukkan bahwa sampai dengan tribulan kedua penggunaan anggaran yang efisien, efektifitasnya mulai terlihat pada capaian nilai investasi sebagai kinerja DPMPTSP yang terealisasi sampai dengan tribulan II. Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan LKPM dan memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta dalam hal urusan PTSP perlu mengoptimalkan promosi potensi dan peluang investasi, proses pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU, Perlu meningkatkan sarana dan prarana Mal Pelayanan Publik dan Perlu pengembangan atau pengintegrasian aplikasi. Adapun telaah atas hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**TELAAH HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Permasalahan	Solusi			
		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100									
		K Volume	Satuan	Rp	K Volume	Satuan	Rp	K	Rp						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100	%	25.000.000	50	%	21.946.000	50,00	87,78						
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	4.943.500	100,00	98,87						
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-						
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   Dokumen	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	4.943.500	100,00	98,87						
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	1	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	17.002.500	0,00	85,01						
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-						
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi   Daerah	1	Daerah	20.000.000	0	Daerah	17.002.500	0,00	85,01						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100	%	475.000.000	50	%	128.404.576	50,00	27,03						
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	8	Dokumen	475.000.000	4	Dokumen	128.404.576	50,00	27,03						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Permasalahan	Solusi			
		7				12 = 8+9+10+11									
		K		Rp	K		Rp	K	Rp						
Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		K	Rp						
<b>Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>															
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   Dokumen	8	Dokumen	475.000.000	4	Dokumen	128.404.576	50,00	27,03						
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota   Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-						
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pengendalian Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>414.744.000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>135.239.100</b>	<b>50,00</b>	<b>32,61</b>						
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>218</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>414.744.000</b>	<b>81</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>135.239.100</b>	<b>37,16</b>	<b>32,61</b>						
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   Kegiatan Usaha	6	Kegiatan Usaha	59.211.000	2	Kegiatan Usaha	15.300.000	33,33	25,84						
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   Pelaku Usaha	200	Pelaku Usaha	227.110.000	75	Pelaku Usaha	113.016.100	37,50	49,76						
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha   Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	128.423.000	4	Kegiatan Usaha	6.923.000	33,33	5,39						
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>129.938.900</b>	<b>50,00</b>	<b>59,06</b>						
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12	Bulan	220.000.000	6	Bulan	129.938.900	50,00	59,06						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Permasalahan	Solusi			
		7				12 = 8+9+10+11									
		K		Rp	K		Rp	K	Rp						
Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		K	Rp						
<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>															
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota   Dokumen	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	3.295.900	100,00	32,96						
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	150.000.000	3103	Pelaku Usaha	122.863.000	155,15	81,91						
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	40.000.000	0	Pelaku Usaha	-	0,00	0,00	Kegiatan akan di laksanakan di TW IV setelah penetapan P-APBD					
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha   Kegiatan Usaha	12	Kegiatan Usaha	20.000.000	8	Kegiatan Usaha	3.780.000	66,67	18,90						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>1.960.000</b>	<b>50,00</b>	<b>3,92</b>						
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan	1	Aplikasi	50.000.000	0	Aplikasi	1.960.000	0,00	3,92						
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   Dokumen	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	1.960.000	0,00	3,92						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Permasalahan	Solusi			
		7				12 = 8+9+10+11									
		K		Rp	K		Rp	K	Rp						
3	4	Volume	Satuan		Volume	Satuan		K	Rp						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPMPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSP    Indeks	90	Indeks	4.275.655.067	0	Indeks	1.935.867.728	0,00	45,28						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu    Dokumen	18	Dokumen	40.000.000	10	Dokumen	2.355.000	55,56	5,89						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	7	Dokumen	5.000.000	4	Dokumen	2.355.000	57,14	47,10						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	11	Laporan	35.000.000	6	Laporan	-	54,55	0,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %	100	%	2.796.431.067	50	%	1.358.725.226	50,00	48,59						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	311	Orang/Bulan	2.793.431.067	130	Orang/Bulan	1.358.725.226	42,00	48,64						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	2	Laporan	3.000.000	0	Laporan	-	0,00	0,00						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	Laporan	-	0	Laporan	-	-	-						
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	0	Laporan	-	-	-						
Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaiyan sesuai Prosedur    Orang	50	Orang	55.000.000	50	Orang	53.002.500	100,00	96,37						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Stell	-	0	Stell	-	-	-						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    Orang	50	Orang	55.000.000	50	Orang	53.002.500	100,00	96,37						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Paket	252	Paket	428.724.000	42	Paket	189.630.151	16,67	44,23						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	25.000.000	6	Paket	12.498.250	50,00	49,99						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Permasalahan	Solusi			
		7			12 = 8+9+10+11								
		K		Rp	K		Rp						
Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	150.000.000	6	Paket	99.565.750	50,00	66,38				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	Paket	30.000.000	6	Paket	11.422.550	50,00	38,08				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	Paket	68.724.000	6	Paket	20.809.500	50,00	30,28				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	Paket	25.000.000	6	Paket	1.518.350	50,00	6,07				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan    Dokumen	12	Dokumen	10.000.000	6	Dokumen	4.150.000	50,00	41,50				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	Laporan	120.000.000	6	Laporan	39.665.751	50,00	33,05				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan	36	Laporan	730.500.000	18	Laporan	274.806.351	50,00	37,62				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	Laporan	175.000.000	6	Laporan	78.764.751	50,00	45,01				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	Laporan	60.000.000	6	Laporan	24.178.000	50,00	40,30				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	Laporan	495.500.000	6	Laporan	171.863.600	50,00	34,68				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara    Unit	18	Unit	225.000.000	10	Unit	57.348.500	55,56	25,49				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	16	Unit	100.000.000	8	Unit	17.900.981	50,00	17,90				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	2	Gedung	125.000.000	1	Gedung	39.447.519	50,00	31,56				
<b>TOTAL &amp; RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024</b>				<b>5.460.399.067</b>			<b>2.353.356.304</b>	<b>41,67</b>	<b>43,10</b>				

### **B A B III**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

#### **3.1. Tujuan Dan Sasaran**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tujuan Meningkatnya Daya Tarik Investasi. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu : Meningkatnya Jumlah Investor, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan, dan Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP. Adapun target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Target Tujuan dan Sasaran Perubahan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Magetan Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			RENJA 2024	P-RENJA 2024	AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Daya Tarik Investasi		Nilai Realisasi Investasi	600 Milyar	600 Milyar	800 Milyar
	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	1400 Investor	4000 Investor	4300 Investor
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	98	98
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Magetan	94	94,25	94,50

#### **3.2. Review terhadap Dokumen Perubahan RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya , serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disajikan dalam tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
 Review Dokumen P-RKPD dengan P-Renja Tahun 2024  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	5.000.000	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	5.000.000
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	28.000.000	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	28.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	25 Orang/ Bulan	2.553.550.750	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	25 Orang/ Bulan	2.553.550.750
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	50 orang	55.000.000	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	50 orang	55.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	25.000.000	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	25.000.000
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Kab. Magetan, Magetan, Semua	12 Paket	231.218.879	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Kab. Magetan, Magetan,	12 Paket	231.218.879

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan				Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kelurahan		
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	30.000.000	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	30.000.000
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	68.724.000	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	68.724.000
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	20.871.450	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Paket	20.871.450
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	10.000.000	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	10.000.000
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	140.000.000	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	140.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	175.000.000	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan, Magetan, Semua	12 Laporan	175.000.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan		
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	73.184.200	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	73.184.200
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	390.339.000	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Laporan	390.339.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	16 Unit	100.000.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	16 Unit	100.000.000
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Unit	124.550.000	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2 Unit	124.550.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	a. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Daerah	20.00.000	a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Daerah	20.00.000
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>					<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>				
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	440.450.000	b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	440.450.000
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>					<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>				

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.394.000	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.394.000
b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	2000 Pelaku Usaha	255.073.971	b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	4000 Pelaku Usaha	255.073.971
c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	40 Pelaku Usaha	27.679.500	c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	40 Pelaku Usaha	27.679.500
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang	Kab. Magetan, Magetan,	12 Kegiatan Usaha	13.989.000	d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Usaha yang	Kab. Magetan,	12 Kegiatan Usaha	13.989.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Semua Kelurahan			di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Magetan, Semua Kelurahan		
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>					<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>				
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan Usaha	59.211.000	a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan Usaha	59.211.000
b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	200 Pelaku Usaha	217.110.000	b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	200 Pelaku Usaha	217.110.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
c. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	128.423.000	c. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	128.423.000
<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>					<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>				
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	49.750.000	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	49.750.000
<b>TOTAL</b>				5.255.518.750	<b>TOTAL</b>				5.255.518.750

### **3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Perubahan Program Kegiatan Tahun 2024 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Keterangan (Rincian Penggunaan dan Tingkat Urgenitas)	Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target		Lokasi		Pagu Indikatif							
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Penjabaran Terakhir	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Percentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100%	100%										
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen										
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		4 Dokumen	20.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen										
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi   Daerah	1 Daerah	1 Daerah	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-		1 Daerah	60.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100%	100%										
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	8 Kali	5 Kali										
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	475.000.000	475.000.000	440.450.000	34.550.000		8 Dokumen	650.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Penanaman Modal	100%	100%										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Keterangan (Rincian Penggunaan dan Tingkat Urgenitas)	Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target		Lokasi		Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Penjabaran Terakhir	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	218 Pelaku Usaha	218 Pelaku Usaha										
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	59.211.000	59.211.000	59.211.000	-		50 Kegiatan Usaha	65.000.000	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	227.110.000	227.110.000	217.110.000	10.000.000		250 Pelaku Usaha	250.000.000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha   Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	128.423.000	128.423.000	128.423.000	-		50 Kegiatan Usaha	150.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Percentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.	100%	100%										
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	2000 Dokumen	4000 Dokumen										
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota   Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000	10.000.000	8.394.000	1.606.000		2 Dokumen	40.000.000	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	150.000.000	150.000.000	255.073.971	105.073.971		4250 Pelaku Usaha	225.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Keterangan (Rincian Penggunaan dan Tingkat Urgenitas)	Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target		Lokasi		Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Penjabaran Terakhir	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	40.000.000	40.000.000	27.679.500	12.320.500		25 Pelaku Usaha	50.000.000	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha   Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.000.000	20.000.000	13.989.000	6.011.000		20 Kegiatan Usaha	30.000.000	
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Percentase data dan sistem informasi yang dikembangkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>										
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi										
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000	50.000.000	49.750.000	250.000		1 Dokumen	150.000.000	
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN DPMPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSP    Indeks</b>	<b>90 Indeks</b>	<b>90 Indeks</b>										
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu    Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen										
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		7 Dokumen	25.000.000	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	11 Laporan	11 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	35.000.000	35.000.000	28.000.000	7.000.000		11 Laporan	60.000.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %	100%	100%										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Keterangan (Rincian Penggunaan dan Tingkat Urgenitas)	Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target		Lokasi		Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Penjabaran Terakhir	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan												
			25 Orang /Bulan	311 Orang /Bulan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.793.431.067	3.020.173.067	2.553.550.750	466.622.317	-		311 Orang /Bulan	3.078.721.228
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	2 Laporan	0	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000		12 Laporan	25.000.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur    Orang	50 Orang	50 Orang										
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    Orang	50 Orang	50 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-		40 Orang	55.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Paket	84 Paket	84 Paket										
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		12 Paket	40.000.000	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	150.000.000	150.000.000	231.218.879	81.218.879		12 Paket	350.000.000	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		12 Paket	50.000.000	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	68.724.000	68.724.000	68.724.000	-		12 Paket	80.000.000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	25.000.000	25.000.000	20.871.450	4.128.550	-	12 Paket	60.000.000	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		12 Dokumen	15.000.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	120.000.000	120.000.000	140.000.000	20.000.000		12 Laporan	150.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan	36 Laporan	36 Laporan										
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-		12 Laporan	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Keterangan (Rincian Penggunaan dan Tingkat Urgenitas)	Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target		Lokasi		Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan Penjabaran Terakhir	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	60.000.000	60.000.000	73.184.200	13.184.200		12 Laporan	85.000.000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	495.500.000	495.500.000	390.339.000	105.161.000	-	12 Laporan	700.000.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara    Unit	18 Unit	18 Unit										
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	16 Unit	16 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		16 Unit	100.000.000	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	2 Gedung	2 Gedung	Kab. Magetan	Kab. Magetan	125.000.000	125.000.000	124.550.000	450.000	-	2 Gedung	250.000.000	
							5.460.399.067	5.687.141.067	5.255.518.750	431.622.317			7.013.721.228	

## **B A B   IV** **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan Perubahan Rencana Kerja ini, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN

  
**S. CONDRORWATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198809 2 001